Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership

Suara dari dua kota : revolusi Indonesia dalam pandangan surat kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta) 1945-47

Suwirta, author

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20251065&lokasi=lokal

---

Abstrak

ABSTRAK
Tesis ini berusaha untuk menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan pandangan antara surat kabar Merdeka di Jakarta dengan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, dalam menanggapi kejadian dan persoalan yang dinilai penting pada masa revolusi di Indonesia. Dengan mengkaji dan menginterpretasi terhadap kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur yang disajikan oleh kedua surat kabar itu -- dimana ketiga variable itu biasanya dianggap sebagai visi dan jatidiri sebuah pers --studi ini menunjukkan bahwa dalam menanggapi masalah strategi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan masalah Persetujuan Linggarjati, surat kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat ternyata memiliki ""suara"" yang berbeda. Sedangkan dalam menanggapi masalah berdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan, kedua surat kabar itu, tentu saja, memiliki pandangan yang sama yaitu menentang dan mengecamnya sebagai tindakan akan mengganggu keutuhan kemerdekaan RI.

Apa yang disuarakan oleh surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta itu, bagaimanapun, tidak bisa dilepaskan dari pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur peri. sebagai pengelola surat kabar yang bersangkutan. Dalam hal ini maka pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan P'mimpin Redaksi surat kabar Merdeka, yaitu B.M. Diah dan R.M. Winarno; serta pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yaitu Bramono dan Soemantoro pada masa awal revolusi perlu diperhatikan. Pandangan dan sikap mereka selama revolusi indonesia, sesungguhnya sangat diwarnai oleh latar belakang pendidikan, usia, agama, sosial, orientasi ideologi, kepentingan politik, dan pengalaman mereka masing-masing.

Ketika para redaktur pers dihadapkan pada masalah politik penting pada masa awal revolusi, yaitu apakah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu akan dilakukan dengan cara ""bertempoer"" atau ""beroending"", pro-kontra terhadap masalah itu melanda kalangan pers juga. Tidak terkecuali dengan surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Adalah menarik bahwa kedua surat kabar itu memiliki ""suara"" yang berbeda dalam menanggapi masalah menentukan strategi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Dalam hal ini faktor keadaan dan tempat di mana kedua surat kabar itu diterbitkan, selain faktor orientasi ideologi-politik tentunya, merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur persnya. Sebagai redaktur pers yang tinggal di Jakarta dan menyaksikan secara langsung kekuatan tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda) yang menduduki daerah itu di satu sisi, serta melihat masih lemahnya pemerintah dan tentara Indonesia di sisi lain, maka surat kabar Merdeka (dalam hal ini B.M. Diah dan R.M. Hinarno) berpandangan bahwa politik diplomasi itu sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya dengan para redaktur pers yang tinggal di kota pedalaman, seperti surat kabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, yang

tidak merasakan kehadiran tentara Sekutu dan menyaksikan gelora semangat dari badan-badan perjuangan yang ada, maka jalan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan RI itu merupakan keharusan. Pandangan dan sikap Soemantoro, sebagai Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yang dekat dengan tokoh-tokoh politik oposisi yang bergabung dalam organisasi Persatuan Perjuangan (PP), menyebabkan surat kabar itu berpandangan sangat kritis dan bersikap menentang politik diplomasinya pemerintah.

Dalam menanggapi masalah Perundingan Linggarjati, surat kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat juga memiliki ?suara? yang berbeda. Dalam hal ini faktor kepentingan politik, merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan dan sikap kedua surat kabar itu. Keterlibatan B.H. Diah (Pemimpin Umum surat Rabar Merdeka) dalam pergumulan politik di Parlemen KNIP dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik oposisi yang bergabung dalam kubu Benteng Republik (BR), menyebabkan surat kabar Merdeka yang dikelolanya itu bersikap sangat kritis dan menentang kebijaksanaan politik pemerintah yang mau menerima hasil-hasil Perundingan Linggarjati. Sebaliknya dengan surat kabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Akibat tekanan yang dilakukan pemerintah terhadap Pemimpin Redaksinya, Soemantoro, yang selalu menentang politik diplomasi; dan masuknya Hadikin Wonohito yang moderat menggantikan kedudukan Bramono sebagai Pemimpin Umum. menyebabkan surat kabar Kedaulatan Rakjat bersikap mendukung kebijaksanaan politik pemerintah dan menerima hasil-hasil Perundingan Linggarjati.

Secara umum, kehidupan pers pada masa revolusi Indonesia, bagaimanapun, memiliki dinamikanya yang khas. Sebagai institusi sosial yang lahir di tengah-tengah perubahan sosial yang cepat, pers mampu menyajikan berita (news) dan memberikan pandangan-pandangan (views) yang sangat bebas. Dengan demikian sikap pro-kontra, simpati-antipati, dan moderat-radikal yang ditunjukkan pers pada masa revolusi itu merupakan sesuatu yang wajar, sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan semangat kemerdekaan. Kebebasan pers pada masa revolusi Indonesia juga nampak dari bentuk bahasa dan gayawacana (mode of discourse) yang digunakan. Pers acapkali menggunakan bahasa yang bersifat tegas, terus terang, emosional, dan bahkan kasar kepada pihak-pihak yang dipandang sebagai lawan. Dalam hal ini kepada pihak Belanda dan kepada orang-orang Indonesia yang mau bekerjasana dengan Belanda -- seperti nampak dalam menanggapi masalah berdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan -- pers

Indonesia nengecam dan menyerangnya dengan bahasa yang kasar dan emosional. Kepada pihak pemerintah RI sendiri, pers Indonesia juga sering bersikap kritis apabila pihak yang pertama itu, dalam pandangan pers, kebijaksanaan politiknya dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat kemerdekaan,

Pertumbuhan pers pada masa revolusi selain didorong oleh pemerintah RI juga didukung oleh masyarakat. Pemerintah RI sangat berkepentingan dengan keberadaan dan pertumbuhan pers itu untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia, terutama tentara Sekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II, bahwa dalam revolusi Indonesia juga terdapat unsur-unsur kehidupan yang demokratis. Adanya parlemen, partai-partai politik, dan pers yang bebas dan mandiri, bagaimanapun, dipandang sebagai ciri dari sebuah negara nasional yang demokratis. Karena itu penerintah RI selain mendorong pertumbuhan pers, membiarkan juga kebebasan pers di Indonesia. Menghadapi suara-suara pers yang kritis dan oposisional kepada pemerintah, misalnya, pihak terakhir itu bersikap cukup demokratis, yaitu membiarkannya sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kekebasan pers pada masa revolusi itu bukannya tanpa restriksi. Terhadap pers yang bersikap kritis dan oposisional itu, dengan dalih membahayakan keselamatan negara dan menggangu ketertiban masyarakat, pemerintah RI akhirnya melakukan tekanan-tekanan juga kepada pers. Tekanan yang dilakukan pemerintah RI terhadap pers itu tidak dalam bentuk penbredeilan -- karena tindakan seperti itu dianggap tidak demokratis -- melainkan dengan penahanan atau penangkapan terhadap Pemimpin Umun atau Pemimpin Redaksi sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam memberikan warna pada suara dan visi Surat kabar yang bersangkutan. Sesungguhnya, dengan tindakan pemerintah yang seperti itu sudah cukup bagi pers yang semula bersikap kritis dan oposisional kepada pemerintah, berubah menjadi pers yang bersikap moderat dan akomodatif, sebagaimana ditunjukkan pada kasus surat kabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta pada masa revolusi Indonesia.